

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ANINDYAH PRASTITI
NIM. 12030111150009

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anindyah Prastiti

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150009

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA**

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt.

Semarang, 23 September 2013

Dosen Pembimbing,

Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt.

NIP. 19760522 200312 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anindyah Prastiti

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150009

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 September 2013

Tim Penguji:

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si, Akt (.....)
3. Faisal, S.E., M.Si., Akt, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anindyah Prastiti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 September 2013

Yang membuat pernyataan,

Anindyah Prastiti

NIM. 12030111150009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"...Niscaya ALLah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al Mujadilah ayat 11)

"..Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri..."

(QS Ar Ra'd ayat 13)

"...Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan..."

(QS AL Insyirah ayat 5-6)

"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna"

(Einstein)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua orangtuaku tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, bimbingan, dan doa yang tulus dan tidak pernah putus sepanjang waktu*
- *Kakak dan adikku tersayang*
- *Keluarga, sahabat, dan teman-teman*

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence about the role of board of commissioners (BOC) and audit committees on earnings management. The examined variables in this research are consisting of independent, dependent and control variables. The independent variables tested in this research consisted of the characteristics of BOC (size, independency, financial expertise, and meetings) and the characteristics of audit committees (size, independency, financial expertise, and meetings). While, the dependent variable is earnings management which is measured by discretionary accrual estimated by using Jones modified model. Last, the control variables are firm's size measured by using the natural logarithm of total assets and leverage measured by the ratio of total debt to total assets.

This research uses data of 244 manufacturing companies listed in IDX from 2009 until 2011. The sampling method used in this research is purposive sampling method. Data of BOC and audit committees were collected from annual report. The data then analyzed using multiple regression analysis.

The results of this research showed that the size of BOC, independency of BOC, and independency of audit committees have significant negative effect on earnings management. The other characteristics of BOC and audit committees have no significant effect on earnings management. However, firm's size and leverage as control variables have positive effect on earnings management.

Keywords: Board of commissioners, audit committees, earnings management, leverage, and firm's size.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Variabel independen yang diuji pada penelitian ini terdiri dari karakteristik dewan komisaris (ukuran, independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi pertemuan) serta karakteristik komite audit (ukuran, independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi pertemuan). Sedangkan variabel dependen yaitu manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner yang diestimasi dengan menggunakan model *Jones* yang dimodifikasi. Variabel kontrol adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan natural logaritma total aset dan leverage diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset.

Penelitian ini menggunakan data dari 244 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data mengenai dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Karakteristik dewan komisaris dan komite audit yang lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sementara ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kata kunci: Dewan komisaris, komite audit, manajemen laba, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi rahmat, hidayah, ilmu, dan hikmah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Nasir M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan masukan hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D. Akt., selaku dosen wali.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.

6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang atas bantuan yang diberikan selama ini kepada penulis.
7. Bapak H. Maryanto dan Ibu Hj. Rukminingsih tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, mendidik, merawat, dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta doa yang tak terhingga bagi penulis.
8. Kakak dan adikku tersayang, mas Febri, dek Rizki, mbak Agis, atas dukungan, saran, dan doa kalian selama ini.
9. Papah, Mamah, dan si kecil Rafa, terima kasih atas doanya selama ini.
10. Teman-teman akuntansi reguler II angkatan 2011, Ruroh, Rahma, Dian, Ana, Lina, Anti, Vida, Destia, Ratu, Abhi, Adit, Dayat, Hafid, Iqbal, Bagus, Deva, Rusli, Fajar, Riza, Soni, Warih, atas kebersamaan di kala susah maupun senang, kebahagiaan dan kekonyolan selama 2 tahun tak terlupakan ini.
11. Sahabat-sahabatku, Asta, Dhela, Emy, Estu, Novita, atas arti persahabatan yang sudah kalian berikan.
12. Para 'chinde', Arik, Firda, Vinta, Whinda, Atrif, atas persahabatan, kegilaan, dan pengalaman berharga selama 3 tahun kita bersama.
13. Teman-teman warga Erte07 gizi undip, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
14. Teman-teman KKN 2013 Desa Kanigoro Kec. Ngablak, Frisca, Efi, Ilma, Nova, Fian, Tama, Eggy, Maul, mas Budi, Tatak, untuk pengalaman singkat yang sangat berharga, kebersamaan dan perjuangan selama KKN.

15. GPASD smaga semarang, terima kasih atas kebersamaan baik di kala suka dan duka, serta untuk pengalaman berharganya yang tak kan pernah tergantikan.
16. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.1.3 Dewan Komisaris	16
2.1.1.4 Komite Audit	18
2.1.1.5 Manajemen Laba.....	20

2.1.1.6	<i>Discretionary Accrual</i>	22
2.1.2	Penelitian Terdahulu	24
2.2	Kerangka Pemikiran	26
2.3	Pengembangan Hipotesis	28
2.3.1	Ukuran Dewan Komisaris.....	28
2.3.2	Independensi Dewan Komisaris	30
2.3.3	Keahlian Keuangan Dewan Komisaris	31
2.3.4	Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris.....	32
2.3.5	Ukuran Komite Audit	34
2.3.6	Independensi Komite Audit	35
2.3.7	Keahlian Keuangan Komite Audit.....	36
2.3.8	Frekuensi Pertemuan Komite Audit.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
3.1.1	Variabel Dependen.....	40
3.1.2	Variabel Independen	41
3.1.2.1	Ukuran Dewan Komisaris	42
3.1.2.2	Independensi Dewan Komisaris.....	42
3.1.2.3	Keahlian Keuangan Dewan Komisaris	43
3.1.2.4	Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris	43
3.1.2.5	Ukuran Komite Audit.....	43
3.1.2.6	Independensi Komite Audit	43
3.1.2.7	Keahlian Keuangan Komite Audit	44
3.1.2.8	Frekuensi Pertemuan Komite Audit	44
3.1.3	Variabel Kontrol	45
3.1.3.1	<i>Firm's Size</i>	45
3.1.3.2	<i>Leverage</i>	45
3.2	Populasi dan Sampel	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	46
3.4	Metode Pengumpulan Data	46
3.5	Metode Analisis.....	47

	3.5.1	Statistik Deskriptif	47
	3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	47
	3.5.2.1	Uji Normalitas	48
	3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	48
	3.5.2.3	Uji Autokorelasi	49
	3.5.2.4	Uji Heteroskedasitas.....	49
	3.5.3	Uji Hipotesis	50
	3.5.3.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	50
	3.5.3.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	50
	3.5.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	51
BAB IV		HASIL DAN PEMBAHASAN	52
	4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	52
	4.2	Analisis Data	53
	4.2.1	Variabel Manajemen Laba.....	53
	4.2.1.1	Mencari Nilai B1, B2, dan B3.....	53
	4.2.1.2	Menghitung <i>Discretionary Accruals</i> (DAC).....	54
	4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif	54
	4.2.2.1	Statistik Deskriptif Ukuran Dewan Komisaris.....	55
	4.2.2.2	Statistik Deskriptif Independensi Dewan Komisaris	55
	4.2.2.3	Statistik Deskriptif Keahlian Keuangan Dewan Komisaris	56
	4.2.2.4	Statistik Deskriptif Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris	56
	4.2.2.5	Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit	57
	4.2.2.6	Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit	57
	4.2.2.7	Statistik Deskriptif Keahlian Keuangan Komite Audit.....	57
	4.2.2.8	Statistik Deskriptif Frekuensi Pertemuan Komite Audit	58
	4.2.2.9	Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan	58

4.2.2.10	Statistik Deskriptif Leverage Perusahaan.....	58
4.2.2.11	Statistik Deskriptif Manajemen Laba	59
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.3.1	Uji Normalitas	59
4.2.3.2	Uji Multikolinearitas	63
4.2.3.3	Uji Autokorelasi	65
4.2.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.3	Pengujian Hipotesis.....	68
4.3.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	68
4.3.2	Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)....	70
4.4	Pembahasan	74
4.4.1	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba.....	74
4.4.2	Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba.....	75
4.4.3	Pengaruh Keahlian Keuangan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba.....	76
4.4.4	Pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba.....	77
4.4.5	Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	78
4.4.6	Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	79
4.4.7	Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	79
4.4.8	Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	80
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Keterbatasan	84

5.3 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Perhitungan Koefisien <i>Discretionary Accruals</i>	53
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.4 <i>One Sample</i> Kolmogorov-Smirnov.....	61
Tabel 4.5 <i>One Sample</i> Kolmogorov-Smirnov Model Perbaikan	63
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson	65
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi dengan Run Test.....	66
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	68
Tabel 4.10 Uji Statistik F	69
Tabel 4.11 Uji <i>Goodness of Fit</i>	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas Data	60
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Data	60
Gambar 4.3 Uji Normalitas Model Perbaikan.....	62
Gambar 4.4 Uji Normalitas Model Perbaikan.....	62
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Sampel Penelitian	91
Lampiran B	Data Variabel Penelitian Size Perusahaan	92
Lampiran C	Data Variabel Penelitian Leverage Perusahaan	94
Lampiran D	Hasil Output SPSS	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Menurut Belkaoui (2006), laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan yang penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu (Handayani dan Rachadi, 2009).

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang (Shita, 2011). Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para *stakeholders*, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan

mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan atau agensi konflik (Faisal, 2004).

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan *statement* keuangan menggunakan dasar akrual (Sutopo, 2009). Dasar akrual ini mempunyai implikasi bahwa laba akuntansi antara lain ditentukan oleh besaran akrual baik yang *discretionary* maupun *nondiscretionary* (Sutopo, 2009). Penentuan *discretionary accruals* dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan laba merupakan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian Yoon *et al.* (2006) menunjukkan bahwa dalam melakukan manajemen laba, perusahaan yang menaikkan laba cenderung menggunakan untung dari penghentian aset, sedangkan perusahaan yang menurunkan laba cenderung menggunakan biaya kerugian piutang dan rugi penghentian aset.

Menurut Watt & Zimmerman (1990) dan Fields *et al.* (2001), *earnings management* mungkin berasal dari fleksibilitas pilihan akuntansi yang diberikan oleh *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). GAAP memungkinkan manajer untuk memutuskan prosedur pelaporan yang sesuai serta membuat estimasi dan asumsi sesuai dengan lingkungan bisnis. Selain itu, dengan opsi yang ditawarkan, para manajer dapat memilih prosedur pelaporan yang bisa menguntungkan serta meningkatkan kekayaan perusahaan (Watt & Zimmerman, 1990). Pada akhirnya terkadang prinsip akrual ini disalahgunakan manajemen untuk mengelabui pihak pemilik perusahaan.

Untuk mencegah manajemen laba yang berlebihan, penerapan *good corporate governance* diperlukan (Sutopo, 2009). Dengan adanya *good corporate governance* dapat membantu para pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran (*fraud*). Struktur *corporate governance* yang baik dapat mengurangi manajemen laba (Sutopo, 2009). *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholder value*. Isu *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Oktafia, 2010).

Menurut Alzoubi & Selamat (2012), pemegang saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan komite audit untuk memantau kinerja manajemen. Oleh karena itu, tanggung jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada efektivitas peran dewan dan komite auditnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya telah difokuskan pada peran komite audit sebagai agen utama dalam memastikan integritas informasi keuangan dan berurusan dengan isu-isu yang berkaitan dengan audit eksternal (Alzoubi & Selamat, 2012). Namun, mengingat bahwa dewan bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite audit dan auditor eksternal, peran mereka sama-sama penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. *The Blue Ribbon Committee* (BRC, 1999, p 6-7) menyatakan bahwa: "kinerja komite audit harus didasarkan pada praktek dan sikap dari seluruh jajaran dewan... Jika dewannya disfungsi, maka komite audit kemungkinan tidak akan jauh lebih baik". Demikian pula,

beberapa studi telah menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berkaitan dengan komposisi dewan keseluruhan (Alzoubi & Selamat, 2012). Dalam penelitian tersebut, peran pengawasan dewan komisaris dan komite audit penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan ke tingkat yang lebih baik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai mekanisme *good corporate governance* yang mempengaruhi manajemen laba sangat beragam. Siregar dan Utama (2005), dan Nuryaman (2008) dalam Setyantomo (2011) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Akan tetapi penelitian Andayani (2010) menemukan hasil yang berlawanan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dechow *et al.*, (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Berapapun jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam

menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou, *et al.* 2001).

Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Lin (2006) memberikan bukti empiris bahwa terdapat karakteristik komite audit, yaitu besarnya ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan negatif pada praktik manipulasi laba yang diukur dari apakah perusahaan melakukan *restatement* atau tidak. Alzoubi & Selamat (2012) mengasumsikan bahwa ukuran komite audit dengan anggota lebih, independensi, memiliki *financial expertise*, dan yang lebih aktif bertemu berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*. Suaryana (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit, kualitas labanya lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palestin (2006) dan Sanjaya (2008) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris dan komite audit independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan regulasi, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono, 2005). Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei *Asian Development Bank* dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, serta peran komite audit terhadap manajemen laba, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit dalam penerapan mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi terjadinya manipulasi laba.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alzoubi & Selamat (2012), yang mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual untuk meneliti peran dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba. Penulis mencoba untuk mereplikasi penelitian Alzoubi & Selamat (2012) dengan mengganti populasi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI), digunakannya *discretionary accrual* sebagai proksi dari manajemen laba, serta menambahkan variabel kontrol untuk mendukung penelitian. Sampel yang digunakan berasal dari

sektor industri manufaktur. Sektor manufaktur dipilih karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian dan tingkat kompetisi yang kuat. Selain itu juga dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara perusahaan pada industri manufaktur dan perusahaan industri lainnya.

Penelitian ini menggunakan instrumen yang sama. Pada karakteristik dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, keahlian keuangan dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan dewan komisaris. Sedangkan karakteristik komite audit yang digunakan sebagai variabel berkaitan dengan ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan (*firm's size*) dan *leverage*. Pentingnya variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana variabel kontrol tersebut ikut mempengaruhi mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat manajemen laba dalam sebuah perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen laba?
2. Apakah independensi dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen laba?

3. Apakah dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan dapat mempengaruhi manajemen laba?
4. Apakah frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen laba?
5. Apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi manajemen laba?
6. Apakah independensi komite audit dapat mempengaruhi manajemen laba?
7. Apakah komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat mempengaruhi manajemen laba?
8. Apakah frekuensi pertemuan komite audit dapat mempengaruhi manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap manajemen laba.
3. Untuk menganalisis pengaruh keahlian keuangan dewan komisaris terhadap manajemen laba.
4. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi pertemuan dewan komisaris terhadap manajemen laba.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.

6. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap laba.
7. Untuk menganalisis pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba.
8. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai *agency theory* dan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dengan menilai efektivitas dari karakteristik dewan komisaris dalam sebuah perusahaan sehingga dapat menghambat manajemen laba.
2. Memberikan pemahaman mengenai pengaruh karakteristik yang terdapat pada komite audit yang dapat mempengaruhi manajemen laba.
3. Mengembangkan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap praktek manajemen laba, yang diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, kredit maupun keputusan lainnya.

2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi mengenai keefektifan regulasi penerapan mekanisme *corporate governance* di Indonesia sehingga dapat menetapkan standar yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan hubungan keagenan sebagai kontrak di antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajer) dimana *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ujiyantho, 2007).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa

mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi-asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ujiyantho, 2007). Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu timbulnya asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori keagenan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Corporate governance diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.1.2 Good Corporate Governance

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

OECD telah mengembangkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi di berbagai negara. Prinsip dasar tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparency*)

Mewajibkan adanya suatu pengungkapan informasi yang terbuka, akurat, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan seperti keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, eksposur resiko dan mengenai kepemilikan dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas pada tingkat Direksi, Komisaris, Komite Audit dan keseluruhan komponen perusahaan.

3. Tanggung jawab (*responsibility*)

Memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan secara berhati – hati sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen resiko, pengendalian internal yang sesuai dan pertanggungjawaban kepada para stakeholders.

4. Keadilan (*fairness*)

Menjamin perlindungan hak – hak para pemegang saham mayoritas maupun minoritas, kreditur, manajemen, karyawan maupun stakeholders yang lain.

Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Centre for European Policy Studies (1995) dalam Ujiyantho (2007) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seluruh sistem dari hak-hak (*rights*), proses, dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan di luar manajemen secara menyeluruh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Hak-hak adalah wewenang yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen. Proses merupakan mekanisme dari implementasi hak-hak tersebut. Sedangkan pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perusahaan, misalnya mengenai laporan audit.

Sistem *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* dan mekanisme *external governance* (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme *internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan mekanisme *external governance* terdiri dari *institutional ownership*, pasar untuk kontrol perusahaan dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Bamhart dan Rosestein, 1998; dalam Ujiyantho (2007)).

2.1.1.3 Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris bersifat independen, mereka tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara objektif, semata-mata untuk kepentingan

perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lainnya.

Menurut FCGI (2003), Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* - yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris dalam FCGI meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;

5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

2.1.1.4 Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, selain

itu Bapepam juga menghimbau bahwa setidaknya-tidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diringkas sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain.

2.1.1.5 Manajemen Laba

Manajemen laba atau yang sering disebut dengan *earning management* adalah tindakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Scott (2003:369) mendefinisikan *earnings management* sebagai "*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*" yang kurang lebih memiliki arti pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Healy and Wahlen (1999, p-365) mendefinisikan *earnings management* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam melaporkan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyetatkan beberapa *stakeholders* tentang dasar ekonomik perusahaan atau untuk mempengaruhi *outcome* kontraktual yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan khusus. Pemilihan kebijakan akuntansi diinterpretasikan dengan jelas. Ketika batas pembagian tidak jelas, manajemen laba membagi kebijakan akuntansi ke dalam dua kategori yaitu: 1) pilihan kebijakan akuntansi yang sesuai. Misal, amortisasi garis lurus atau saldo menurun, kebijakan untuk

pengakuan pendapatan dan 2) *discretionally accruals*. Ketentuan untuk *credit losses*, nilai persediaan serta waktu dan jumlah item ekstarordinari (Hari, 2012).

Menurut Scott (2003) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earnings management*, antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi pajak

Pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan.

2. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya.

3. Penawaran saham perdana (IPO)

Manajer perusahaan yang *go public* melakukan *earning management* untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan.

4. Motivasi pasar modal

Misalnya untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Aji (2012) dapat dilakukan dengan cara:

a) *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

b) *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c) *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

d) *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.1.6 Discretionary Accrual

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada

pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals* (Gumanti, 2001). Menurut Healy (1985) dan DeAngelo (1986) dalam Gumanti (2001) konsep model akrual memiliki dua komponen: Komponen *nondiscretionary* dan *discretionary*.

Komponen *discretionary accruals* merupakan bagian akrual yang dapat dimanipulasi oleh manajer. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Sebaliknya komponen *nondiscretionary* ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi atau permintaan terhadap penjualan serta faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manajer. *Discretionary accruals* di antaranya penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty extense*) dan aset modal (*capitalization assets*). Manajer akan melakukan manajemen laba dengan manipulasi akrual-akrual tersebut untuk mencapai tingkat pendapatan yang dinginkannya.

Penentuan *discretionary accruals* di atas dengan maksud untuk menaikkan atau menurunkan laba merupakan tindakan manajemen laba (*earnings management*). Hasil penelitian Yoon et al. (2006) menunjukkan bahwa dalam melakukan manajemen laba, perusahaan yang menaikkan laba cenderung menggunakan untung dari penghentian aset, sedangkan perusahaan yang menurunkan laba cenderung menggunakan biaya kerugian piutang dan rugi penghentian aset.

Hasil penelitian Gumanti (2001) menunjukkan bahwa terdapat manajemen laba dalam *statement* keuangan perusahaan sebelum *go public* dengan menggunakan akrual yang menaikkan laba. Manajemen laba ini dilakukan dengan

tujuan tertentu. Dengan menggunakan akrual yang menaikkan laba, maka akan didapatkan harga saham yang relatif tinggi pada waktu penerbitan saham. Balsam et al. (2003) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis industri mempunyai *discretionary accruals* lebih rendah dan koefisien respon laba lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor non-spesialis. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor yang tinggi dalam industri yang diaudit dapat mengurangi manajemen laba meningkatkan kualitas laba dan menambah manfaat informasi laba.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap terjadinya manajemen laba.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Chtourou, Bedard, dan Courteu (2001)	Corporate Governance and Earnings Management	Variabel Dependen: Earnings management (discretionary accrual) Variabel Independen : audit committee (independence, competence, activity) and board characteristics (size, independence, motivation, competence)	Karakteristik komite audit berpengaruh negatif dengan manajemen laba. Sedangkan pada karakteristik dewan komisaris, hanya ukuran dan kompetensi dewan yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
2.	Klein (2002)	Audit Committee, Board of	Variabel Dependen: Earnings management	Terdapat hubungan negatif antara dewan komisaris independen dan tingkat

		Director Characteristics and Earnings Management	Variabel Independen : audit committee and board characteristics	manajemen laba
3.	Xie <i>et al.</i> (2003)	Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee	Variabel Dependen: Earnings management Variabel Independen : <i>CEO Duality, Number of Board Meetings, Board Composition, Audit Committee, Executive Committee</i>	Komisaris independen dan komite audit yang aktif dan memiliki pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam pencegahan kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.
4.	Siregar dan Utama (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>)	Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, praktek <i>Corporate Governance</i> (ukuran KAP, proporsi dewan komisaris, keberadaan komite audit)	Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan tiga variabel praktek GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
5.	Lin, Li dan Yang (2006)	The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality	Variabel Dependen: Earnings Restatement Variabel Independen: Audit komite : Independensi, Ukuran, Jumlah Pertemuan, Kepemilikan Saham, Financial Expertise	Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian laba kembali. Sedangkan independensi, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian laba kembali
6.	Nasution dan Setiawan (2007)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan	Komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

7.	Ujiyantho & Pramuka (2007)	Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Variabel Dependen: Manajemen laba, Variabel Independen: Audit komite : Proporsi dewan komisaris, Jumlah dewan komisaris	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba
8.	Suryani (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan Dependen: manajemen laba	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
9.	E.S.S Alzoubi & M.H. Selamat (2012)	The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms on Constraining Earning Management: Literature Review and Proposed Framework	Variabel Dependen: Earnings Management Variabel Independen : Dewan Direksi: Ukuran, Independensi, Jumlah Pertemuan, Financial Expertise Audit komite : Independensi, Ukuran, Jumlah Pertemuan, Financial Expertise	

2.2 Kerangka Pemikiran

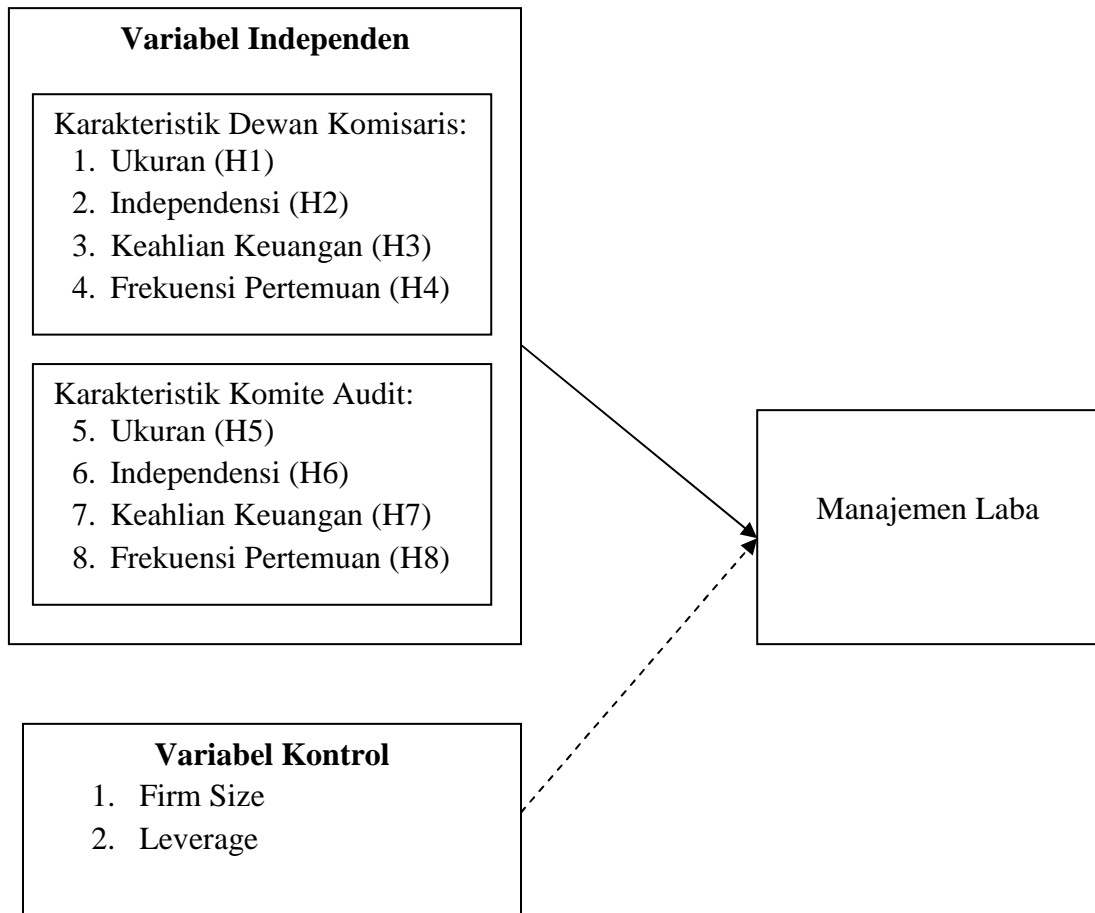
Manajemen laba dilakukan perusahaan untuk mengelola laba sehingga laba yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemilik. Manajemen laba terjadi sebagai akibat asimetri informasi dalam teori keagenan. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya. Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan

mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan.

Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori keagenan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam penerapan *good corporate governance* adalah peranan dewan komisaris dan komite audit. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit diduga dapat mempengaruhi praktek manajemen laba. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit apa sajakah yang dapat meminimalisasi manajemen laba. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan proksi *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen *total accruals* yang berasal dari rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi pada metode akuntansi.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat diilustrasikan seperti pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Ukuran dewan diyakini sebagai aspek dasar dari pengambilan keputusan yang efektif. Lipton dan Lorsch (1992) merekomendasikan bahwa ukuran dewan yang ideal tidak boleh melebihi delapan atau sembilan orang. Jensen (1993) menyatakan bahwa ketika dewan lebih dari

tujuh atau delapan anggota, itu kurang efektif karena masalah koordinasi dan proses, yang pada gilirannya memperlemah pengawasan.

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Pengawasan dilakukan agar kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Vafeas (2000) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.

Hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang menemukan adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Nasution dan Setyawan (2007), Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Ujiyantho (2007). Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Namun karena dewan komisaris bertugas untuk memonitor atas pelaporan keuangan perusahaan, maka perannya diharapkan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Oleh karena itu hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba.

2.3.2 Independensi Dewan Komisaris

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Keberadaan komisaris independen diatur dalam ketentuan peraturan pencatatan efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000 (FCGI, 2002). Perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern dalam perusahaan (Chtourou *et al.* 2001). Beasley (1996) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan untuk mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan secara konsisten menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan mampu mengurangi praktek manajemen laba (Carcello et al, 2002; Davidson et al, 2005; Klein, 2002; O'Sullivan, 2000; Peasnell et al, 2005; Xie et al, 2003, dalam Alzoubi & Selamat, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat hubungan negatif antara independensi dewan komisaris dengan manajemen laba.

2.3.3 Keahlian Keuangan Dewan Komisaris

Terdapat tiga hipotesis yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu: *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost*. Ketiga hipotesis tersebut merupakan sisi lain dari teori keagenan yang menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan lebih baik.

Fungsi dewan komisaris sendiri adalah sebagai pengawas dan penasihat namun tidak bertindak sebagai pengambil keputusan operasional karena tugas pengambilan keputusan operasional menjadi tanggung jawab dewan direksi.

Dewan komisaris diharapkan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan agar efektivitas fungsi pengawasan dapat lebih ditingkatkan.

Chtourou et al. (2001) menyatakan bahwa dewan komisaris dengan jabatan yang lebih tinggi dan berpengalaman cenderung dikaitkan dengan manajemen laba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keahlian dewan yang lebih tinggi menyebabkan pengawasan yang lebih tinggi. Selain itu, dewan komisaris yang memiliki keahlian dapat memahami dan mengatasi masalah laporan keuangan. Xie et al. (2003) menemukan bahwa manajemen laba cenderung jarang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh dewan komisaris yang memiliki latar belakang keuangan.

Keahlian dalam akuntansi dan keuangan akan bermanfaat bagi dewan komisaris untuk memahami laporan keuangan dan masalah-masalah dalam pelaporan keuangan dengan lebih baik. Dengan demikian hipotesis berikut dikembangkan:

H3: Terdapat hubungan negatif antara dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan dengan manajemen laba.

2.3.4 Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan membahas mengenai arah dan

strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh manajemen, serta mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Menurut Conger et al. (1998), semakin sering diadakannya pertemuan dewan, maka akan meningkatkan efektivitas dewan. Dewan yang aktif mengadakan pertemuan lebih cenderung untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Vafeas, 1999) dan lebih berupaya dalam memantau integritas laporan keuangan.

Dari perspektif teori keagenan, frekuensi pertemuan dapat dipandang sebagai proksi waktu yang digunakan dewan untuk melaksanakan tugas dan tingkat kegiatan *monitoring* mereka (Laksamana, 2008). Dengan sering diadakan pertemuan dewan, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat.

Xie et al. (2003) menyatakan bahwa dewan yang jarang bertemu mungkin hanya memiliki waktu untuk menyetujui rencana manajemen dan mendengarkan presentasi sehingga waktu untuk fokus pada isu-isu seperti manajemen laba akan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dewan mempengaruhi kinerja, dan ini merupakan faktor penting untuk menghambat manajemen laba.

Chen et al. (2006) menyatakan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan. Dengan adanya evaluasi kinerja dan pengawasan secara rutin diharapkan akan membuat manajer sulit melakukan manipulasi data keuangan sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalisir (Aryani, 2011).

Berdasarkan semua penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat hubungan negatif antara frekuensi pertemuan dewan komisaris dengan manajemen laba.

2.3.5 Ukuran Komite Audit

Sebuah komite audit merupakan solusi tepat untuk mengurangi biaya keagenan sesuai dengan pernyataan Alchain dan Demsetz; Fama dan Jensen dalam Kusuma (2012) yang menyatakan bahwa teori keagenan mengemukakan *moral hazard* yang melekat dalam prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham.

Dalton *et al.* (1999) dalam Rahmat *et al.* (2008) menemukan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Komite audit dengan jumlah anggota besar cenderung kehilangan fokus dan menjadi kurang partisipatif dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Di sisi lain, komite audit dengan jumlah anggota kecil kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang beragam, sehingga menjadi tidak efektif. Ukuran komite audit yang tepat akan memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*.

Lin (2006) membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan manajemen laba (*discretionary accrual*). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

Sedangkan Pierce dan Zahra (1992) dalam Rahmat *et al.* (2008) menunjukkan hubungan positif antara ukuran komite audit dan kinerja keuangan perusahaan. Bahwa efektivitas komite audit meningkat ketika ukuran komite bertambah, karena memiliki sumber daya lebih untuk ditujukan pada isu atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Singkatnya, dengan ukuran komite audit yang lebih besar maka pengawasan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif. Dengan demikian hipotesis berikut diajukan:

H5: Terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan manajemen laba.

2.3.6 Independensi Komite Audit

Hubungan empiris di antara komite audit dengan *monitoring* dijelaskan oleh teori keagenan, yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (agen) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (prinsipal). Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah independensi. Anggota komite

audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba. Beasley (1996) menemukan hubungan negatif signifikan antara persentase komisaris independen dalam komite audit dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie *et al.* (2003) yang juga menyatakan bahwa independensi komite audit juga berhubungan negatif dengan *discretionary accrual*.

Hal ini didukung dengan bukti empiris oleh Ebrahim (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara keterjadian manajemen laba dengan komite audit yang terdiri dari anggota yang independen. Karena semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba. Dengan demikian hipotesis berikut diajukan:

H6: Terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba.

2.3.7 Keahlian Keuangan Komite Audit

Teori keagenan menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Sebagai penerima wewenang, manajer seharusnya

bekerja untuk pemilik. Namun, manajer memanfaatkan peluang tersebut untuk menjejahterakan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan manajer dengan menyajikan informasi yang telah direkayasa.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit. Bapepam (2004) menghendaki bahwa salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Xie *et al.* (2003) membuktikan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif serta berpengetahuan di bidang keuangan menjadi faktor penting untuk mencegah kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Keahlian di bidang keuangan sama pentingnya bagi komite audit karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Xie *et al.* (2003) dan Choi *et al.* (2004) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba.

DeZoort (1998, p-17) menyatakan bahwa pengalaman anggota komite audit di bidang akuntansi akan sangat penting untuk pemahaman yang memadai tentang *monitoring*. Abbot *et al.* (2004) dan DeZoort *et al.* (2001) dalam Lin *et al.* (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *financial expertise* dengan adanya manajemen laba. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu *financial expertise* akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Terdapat hubungan negatif antara komite audit yang memiliki keahlian keuangan dengan manajemen laba.

2.3.8 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Karakteristik komite audit berikutnya adalah jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (agen) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Teori keagenan berpendapat bahwa dewan yang independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Carcello et al. (2002) menyatakan bahwa dewan independen dapat menuntut pengawasan internal yang lebih besar atas proses pelaporan keuangan untuk melindungi reputasi mereka. Tuntutan ini dapat mengakibatkan pertemuan komite audit yang lebih sering (Menon dan Williams, 1994).

Bapepam (2004) menghimbau bahwa setidaknya-tidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. Pertemuan dalam komite audit minimal dilakukan empat bulan sekali dan berdiskusi tentang laporan keuangan dengan auditor eksternal. Bapepam mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, manajer kemungkinan tidak akan dapat memanipulasi laba. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa melalui pertemuan dan pengamatan secara langsung, komite audit diharapkan dapat mengurangi tingkat manajemen laba.

Xie *et al.* (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Beasley *et al.* (2000) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2009) dalam Setyantomo (2011) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata tidak efektif mengurangi tingkat manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada. Untuk pengujian lebih lanjut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H8: Terdapat hubungan negatif antara frekuensi pertemuan komite audit dengan manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Penyajian laba merupakan hal yang sering dimanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang terlihat menguntungkan. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan cara menghitung *discretionary accrual*. Pengukuran *discretionary accrual* sebagai proksi kualitas laba (manajemen laba) menggunakan Model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow *et al.* (1995). Model ini dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Untuk mendapatkan nilai *discretionary accrual* dilakukan dengan menghitung langkah-langkah berikut ini :

a) Menghitung *total accrual* dengan persamaan:

$$TAC_{it} = Niit - CFO_{it}$$

Dimana, TAC_{it} = Total akrual Niit = Laba Bersih

CFO_{it} = Arus kas Operasi

b) Menghitung nilai *accruals* dengan persamaan regresi linear sederhana atau

Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan:

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t - \Delta Rect)/A_{it-1} + \beta_3 (PPE_t/A_{it-1}) + e$$

c) Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accrual* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t - \Delta Rect)/A_{it-1} + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1}) + e$$

d) Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = TAC_{it}/A_{it-1} - NDA_{it}$$

Dimana,

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

$\Delta Rect$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = error

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris, yaitu ukuran, independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi pertemuan, serta karakteristik komite audit, yaitu ukuran, independensi, keahlian keuangan dan frekuensi pertemuan.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al*, 2003; dalam Ujiyantho, 2007). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004; dalam Ujiyantho, 2007). Ukuran dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004; dalam Ujiyantho, 2007). Proporsi dewan komisaris independen dilambangkan dengan prop. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase (%) anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

3.1.2.3 Keahlian Keuangan Dewan Komisaris

Keahlian dalam akuntansi dan keuangan akan bermanfaat bagi dewan komisaris untuk memahami laporan keuangan dan masalah-masalah dalam pelaporan keuangan dengan lebih baik. Variabel ini diukur dengan cara mencari persentase dari jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki *financial expertise* terhadap jumlah anggota dewan komisaris keseluruhan.

3.1.2.4 Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris

Sesuai dengan aturan yang berlaku, frekuensi rapat dewan komisaris adalah minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun berjalan.

3.1.2.5 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut Bapepam perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota audit.

3.1.2.6 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat.

Selain itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan persentase antara anggota yang independen menurut ketentuan Bapepam terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

3.1.2.7 Keahlian Keuangan Komite Audit

Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai komite audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (*financial expertise*). Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian di bidang finansial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material. Variabel ini diukur dengan cara mencari persentase dari jumlah anggota komite audit yang merupakan ahli keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan.

3.1.2.8 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam tahun berjalan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variable kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.1.3.1 *Firm's Size*

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan, pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari jumlah total aset perusahaan sampel. Diukur dengan menggunakan log (Ln) dari total aset perusahaan.

3.1.3.2 *Leverage*

Leverage didefinisikan sebagai total hutang terhadap total aset. *Leverage* digunakan sebagai proksi untuk tingkat kedekatan terhadap pelanggaran perjanjian utang. *Leverage* dihipotesiskan berhubungan positif dengan manajemen laba. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio yang didapat dari perhitungan total kewajiban dibagi total aset.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009 sampai

dengan tahun 2011. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu (Suaryana, 2005). Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan perusahaan di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya diperdagangkan selama periode 2009-2011.
2. Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan.
3. Perusahaan memiliki informasi lengkap mengenai struktur dewan komisaris maupun komite audit atau tata kelola perusahaan, serta data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba.
4. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan-perusahaan tercatat periode 2009-2011. Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

2) Studi dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik. Untuk mencapai kondisi yang baik, maka persamaan regresi harus memenuhi asumsi klasik. Sebelum pengujian

hipotesis terlebih dahulu data diuji apakah terdapat kondisi normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dideteksi dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dengan analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikan di bawah $\alpha=0,05$ berarti suatu variabel dikatakan tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 , berarti tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai *VIF* > 10 , berarti terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2006), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi $= 0$, sehingga tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi > 0 , sehingga ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi < 0 , sehingga ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji grafik maupun uji statistik. Uji grafik dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain uji grafik, uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan metode statistik berupa uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terkena heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tetapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* berkisar antara nol dan satu. Jika nilai *adjusted R²* semakin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t-test ini pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. H_0 yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan nol.

$\alpha > 0,05$: tidak mampu menolak H_0 $\alpha < 0,05$: menolak H_0